

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gerakan reformasi 1998 secara nyata membawa perubahan yang cukup signifikan bagi sistem sosial politik di Indonesia. Masa tersebut menjadi satu titik awal perubahan setelah tergulingnya pemerintahan otoriter Soeharto selama 32 tahun. Reformasi menjadi gerakan politik yang mampu menciptakan perubahan dalam partai politik yang mampu menciptakan partai-partai baru yang dapat berkompetisi dalam ajang pemilihan umum. Apalagi, hal ini tak lepas dari budaya politik yang mewarnai dengan kecenderungan-kecenderungan yang muncul di dalam sebuah sistem politik. Menurut Almond & Powell (1978) sistem politik selalu merupakan campuran antara modernitas dan tradisi. Modernitas direpresentasikan dengan demokrasi sedangkan tradisi dilambangkan oleh politik agama, khususnya Islam. Menurut Almond dan Powell, dalam perkembangannya, sebuah sistem akan melakukan sekularisasi budaya politik (*cultural secularization*) yang mendorong masyarakat untuk lebih rasional.

Partai *Catch-all*, merupakan bentuk partai gabungan antara partai kader dan partai massa. Istilah *Catch-all* dikemukakan oleh Kirchheimer (2015) untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. *Catch-all* dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai

pengganti ideologi yang kaku. Sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan, partai politik Islam merubah dirinya menjadi partai *Catch-all* dan mengesampingkan ideologi “keislamannya”. Hal inilah yang kemudian membuat partai politik Islam harus bersaing dengan partai-partai non-agama yang juga merupakan partai *Catch-all*.

Elektabilitas dan citra partai politik Islam pasca reformasi, tepatnya pemilu 2009 mengalami kemunduran karena adanya perubahan signifikan dalam budaya politik masyarakat Indonesia, dimana rasionalitas menjadi hal yang lebih diutamakan dibandingkan sebelumnya. Pemilih memberikan keputusan secara rasional dengan memilih partai politik yang lebih menawarkan solusi dengan slogan yang bersih. Parpol yang mengusung isu anti korupsi lebih mudah diterima publik dari pada menonjolkan jargon ideologi keislaman.

Hal ini pernah dilakukan PKS pada pemilu 2004 dan 2009. PKS tak menonjolkan Ideologi keislamannya, karena melihat segmentasi pemilih yang cenderung rasional untuk memilih parpol yang bersih. Dan PKB pun juga membuat langkah terobosan dengan menawarkan jargon Partai Hijau (*green party*), yang berarti partai yang pro terhadap lingkungan bersih, anti polusi dan go green. Karena memang isu *go green* hampir menjadi isu mainstream bagi masyarakat yang cinta lingkungan yang bersih dan sehat.

Di era sekarang ini, untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, parpol harus menawarkan program yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Partai-partai politik baik yang berideologi Islam maupun yang berbasis massa Islam tidak lagi mengandalkan politik aliran, melainkan benar-benar harus memilih isu

strategis yang sedang diidolakan publik. Meskipun Islam adalah asas partai, tapi PKS mengakui prularisme dan multikulturalisme. PKS menggunakan prinsip khilafah, yaitu prinsip bahwa manusia adalah pemimpin di muka bumi dalam hal agama dan politik. Dalam isu pemerintahan, salah satu agenda utamanya adalah menempatkan ulama, intelektual, dan aparat pemerintahan dalam suatu sistem institusi sehingga ketiganya dapat saling bekerjasama. Basis massa PKS adalah pemuda muslim, santri, akhwat dan intelektual muda dari universitas. Pada pemilu 1999 PKS berhasil mendulang suara sebanyak 1,36%, pemilu 2004 sebanyak 7,34%, dan pemilu 2009 sebanyak 7,88%. Pada Pemilu 2014, PKS terus mengalami kemunduran drastis karena terganjal oleh kasus korupsi yang dilakukan para kadernya. Terakhir adalah kasus Gatot Pujo, Gubernur Sumatera Utara yang juga tersangkut kasus korupsi.

Sedangkan PPP pasca-reformasi menghapus unsur intervensi pemerintah pada dirinya, salah satunya ditandai dengan kembalinya lambang bergambar Ka'bah sebagai lambang partai. PPP berlandaskan agama, kemanusiaan, keadilan sosial, kebenaran, dan kejujuran. Tujuan utama PPP adalah mewujudkan masyarakat makmur secara material maupun spiritual, dan menjunjung multikulturalisme. Pada pemilu 1999, PPP berhasil memperoleh 12,26% suara (58 kursi), pemilu 2004 memperoleh 10,4% suara dan pemilu 2009 5,32% suara. Namun pada pemilu 2014, PPP semakin terpuruk juga karena tersandung kasus korupsi yang dilakukan Ketua Umumnya. Disamping dilanda konflik internal yang tak kunjung ada penyelesaian sampai saat ini.

Jika dilihat dari perjalanan Partai Politik yang berideologi Islam mengalami keterpurukan dalam mendulang suara pada Pemilu 1999. Meskipun partai Islam merajai peserta demokrasi, dan menawarkan harapan baru, namun animo masyarakat Indonesia masih berpihak pada ideologi nasionalis. Partai Islam dan ideologi Islam belum dinilai masyarakat sebagai ideologi yang cocok di Indonesia. Begitupun pada pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014 dimana partai Islam semakin tergesur oleh Parliamentary Threshold dan hanya tersisa 4 (empat) partai Islam yang lolos ke legislatif yaitu PPP, PKB, PAN dan PKS dengan perolehan kursi jauh lebih kecil dibanding dengan partai nasionalis.

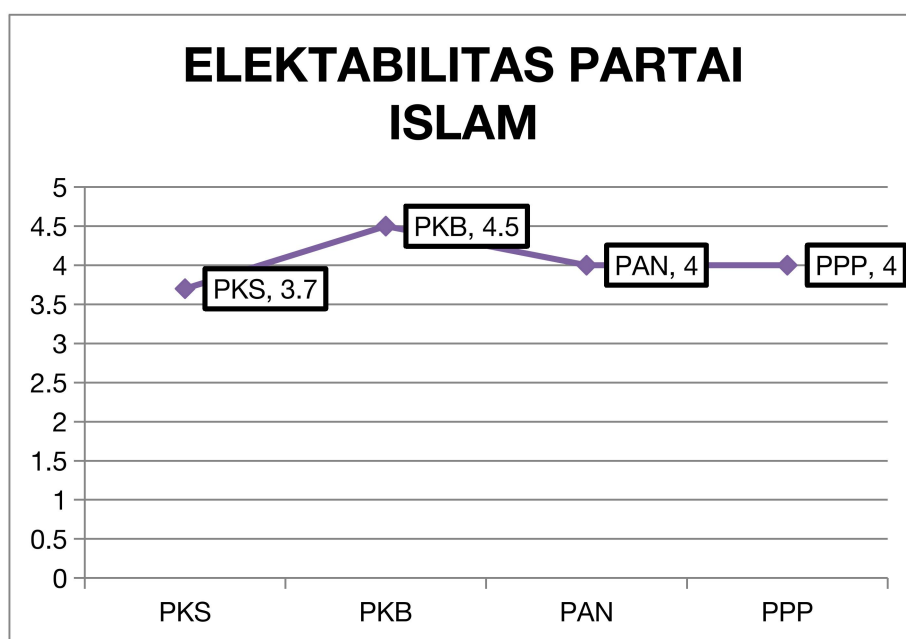
Meskipun demikian satu hal yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Langsung atau tidak langsung, yang demikian itu mempunyai implikasi politik. Dengan kata lain, kekuatan politik apa pun, lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhitungkan realitas demografis. Artinya, massa Islam bakal diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik guna mencari dukungan. Ibarat “gadis” yang akan selalu diperebutkan, bagaimana seharusnya Islam bersikap di tengah polarisasi politik yang tajam.

Partai-partai Islam sesungguhnya masih mencerminkan budaya politik yang terjadi pada Orde Lama meskipun dalam taraf yang berbeda. Pertama, kontestasi antara sekular dan agama nampaknya berakhir dengan sekular sebagai pihak yang dominan. Kedua, politik aliran telah melemah sehingga kelompok-kelompok sosial pun tak lagi memiliki komitmen yang kuat kepada aliran tertentu. Politik aliran tak lagi menjadi jualan yang laku atau diminati oleh publik Indonesia, setidaknya sampai

detik ini. Justru sekarang ini sudah tidak relevan lagi mengusung ideologi Islam, karena publik lebih menghendaki sosok yang mempunyai integritas tinggi, jujur, tegas dan tentunya bersih.

Berdasarkan survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) tahun 2012 memaparkan bahwa nasib partai-partai Islam hanya akan memperoleh suara di bawah 5 %, yaitu antara 2-3 %. Partai-partai Islam yang masuk kategori ini adalah PKS, PPP, PKB, dan PAN. Dengan temuan itu, LSI memprediksi bahwa pada Pemilu 2014 nanti, diperkirakan hanya 2-3 partai Islam saja yang lolos masuk ke parlemen dengan perolehan sesuai dengan ambang batas yang ditentukan (*parliamentary treshold*).

Gambar 1.1 Elektabilitas partai Islam dalam Pemilu 2014



Sumber :Lingkaran Survei Indonesia, (2013)

Berdasarkan Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) pada bulan Maret tahun 2013 juga menunjukkan hasil yang hampir mirip dari tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan partai Islam, rata-rata mereka mendapatkan dukungan kurang dari 5 %. Dari survei LSI Network yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia dengan mengambil 1200 responden itu, tampak bahwa elektabilitas PKB tercatat 4,5 %, PPP 4 %, PAN 4 %, dan PKS 3,7 %. Jika kita perhatikan performa para tokoh Islam pada survei-survei terakhir, juga nampak bahwa elektabilitas mereka tidak ada yang masuk 4 besar kandidat calon presiden RI tahun 2014. Sebaliknya, calon presiden Indonesia didominasi oleh figur-figur yang berasal dari kalangan partai nasionalis(Fanani, 2013).

Pada era reformasi saat ini, partai politik cenderung mengalami konflik internal. Faktor yang menyebabkan konflik internal tersebut, antara lain, disebabkan oleh pilihan oposisi dan koalisi. Muncul kecenderungan, partai-partai politik yang terlibat dalam konflik internal, sebagian memunculkan perpecahan yang berujung pada lahirnya kepengurusan ganda dan sebagian lagi melahirkan partai-partai baru. Konflik internal kerap muncul dalam partai-partai politik tersebut yang memperlihatkan betapa lemahnya kohesivitas dan soliditas di tubuh partai politik. Konflik internal pada partai-partai politik juga menandakan betapa minimnya pelembagaan di tubuh partai dalam mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Kecenderungan konflik internal bukan disebabkan perbedaan platform, ideologi partai maupun visi-misi, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden atau pemerintahan serta kepentingan kekuasaan.

Sejarah konflik internal partai yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa reformasi, saja lahirnya banyak partai tidak lepas dari konflik internal dan dinamika perkembangan partai politik. Partai politik merupakan bagian terpenting dalam system demokrasi, terlebih system demokrasi perwakilan (*modern democracy*). Partai Politik merupakan salah satu sarana kepentingan kelompok maupun elit dalam rangka memenangkan pengaruh dan posisi penting dalam partai. persoalan kepentingan yang diperjuangkan dalam partai secara langsung maupun tidak langsung melahirkan segmentasi dalam tubuh partai yang termanifestasi dalam bentuk faksionalisasi. (Nurjaman, 2018)

Pasca pemilu 2014 konflik terjadi di internal partai yang bermuara pada terbentuknya kepengurusan ganda. Konflik merupakan suatu yang inheren dalam setiap masyarakat atau partai politik maupun organisasi tak bisa lepas dari konflik. Budaya politik adalah orientasi warganegara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya, terdiri dari sistem keyakinan-keyakinan empiris, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang mendefinisikan situasi di mana tindakan politik berlangsung.

Powell, Dalton dan Strom (2015) menyampaikan setidaknya terdapat tiga trend yang mempengaruhi budaya politik. Pertama adalah demokratisasi. Kedua adalah marketisasi (*marketization*). Dan yang Ketiga adalah globalisasi. Yang kemudian menjadi acuan dasar yang cukup memberikan pengaruh pada proses budaya politik yang terjadi dalam negara sekalipun bukan penganut demokrasi. Sedangkan menurut Levine (1982) "*Political socialization refers to the way in which political values are formed and political culture is transmitted from one generation to the next*".

Memperlihatkan bahwa sosialisasi politik lebih merujuk pada metode di mana sebuah kebudayaan mampu menyampaikan budaya politiknya kepada para anggotanya. Yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik termasuk dalam budaya politik (Almond & Powell, 1978; Levine, 1982).

Maka dari itu, untuk menjaga soliditas partai dari ancaman perpecahan, faktor ideologi saja ternyata tidak cukup. Hampir semua partai dengan latar belakang ideologi baik sekuler (komunis, sosialis, nasionalis) maupun islam, mengalami adanya perpecahan. Sehingga, perlu ditemukan faktor apa yang menyebabkan runtuhnya soliditas sebuah partai, dan faktor yang dapat menimbulkan perpecahan dalam partai politik. Tentunya agar menjadi pembelajaran untuk dapat mengatur dan mengelola partai politik secara lebih baik. Sekaligus agar menjadi salah satu barometer bagi publik untuk melihat kapasitas partai politik dalam mengelola organisasi politik sebagai miniatur dari sistem politik negara, menyikapi hal ini tidak terlepas dari peranan partai politik islam yakni PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang dianggap mempunyai soliditas yang baik.

Dalam perjalanannya PKS kemudian mengalami dinamika internal terkait kebijakan partai yang bermetamorfosis menjadi partai “terbuka”. Wacana ini diambil PKS pasca MUKERNAS di Bali. Perubahan sikap PKS ini menimbulkan dua perdebatan pro dan kontra. Kubu yang menolak dengan wacana ini merupakan kelompok yang Idealis (kelompok keadilan) sedangkan yang menerima merupakan para elit PKS yang progresif-pragmatis (kelompok Sejahtera). Wacana sebagai parpol

“terbuka” dianggap akan melunturkan ideologi mereka dan menggeser simbol-simbol keagamaan partai.

Dalam kasus PKS, isu moral politik yang menimpa kader adalah hal paling krusial yang harus dihadapi menjelang Pemilu 2014. Isu negatif yang paling disorot hingga sekarang yaitu kasus suap impor daging sapi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq selaku Presiden PKS. Luthfi terbukti menerima suap daging impor sebesar Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT. Indoguna Utama di Kementerian Pertanian. Luthfi divonis 18 tahun penjara dan hak politiknya dicabut. Permasalahan tersebut harus dibayar mahal dengan kemerosotan suara partai PKS dibawah kendali Anis Matta. Sejumlah lembaga survei meyakini bahwa perolehan suara PKS di Pemilu 2014 akan turun drastis.

Sejak ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaq menjadi tersangka kasus suap peningkatan kuota sapi impor oleh KPK pada awal 2013 telah menyebabkan penurunan tersendiri bagi elektoral partai. Tragedi yang telah menimpa PKS saat ini seakan menjadi penanda dua indikasi tertentu, yaitu rapuhnya perjuangan politik dakwah dalam memperbaiki umat melalui partai politik dan intensitas pertarungan politik praktis yang mengedepankan kepentingan partai lebih dominan ketimbang memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Keberhasilan PKS dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan perolehan suaranya dalam setiap kali pemilu di tengah tingginya gejala electoral volatility yang dialami hampir semua partai politik merupakan sebuah kajian yang cukup menarik. Keberhasilan PKS ini semakin menarik lagi ketika dalam perjalanannya PKS juga

mengalami momen-momen kritis sepanjang ke ikut sertaanya dalam pemilu. Persoalan tersebut tidak memberi dampak yang serius terhadap performa partai seperti halnya yang dialami oleh beberapa partai lainnya yang merasakan dampak negatif terhadap perolehan suaranya, namun PKS justru mengalami kecenderungan peningkatan perolehan suara di setiap pemilu. Di tengah masalah yang dihadapi PKS ini, hasil pemilu menunjukkan penurunan persentase peroleh suara dan perolehan kursi yang diperoleh PKS ternyata berkorelasi negatif dengan pertumbuhan perolehan suaranya secara nasional. Pada pemilu 2009 PKS memperoleh suara secara nasional sebesar 8.206.955 dan justru mengalami peningkatan menjadi 8.480.204 di tahun 2014. Angka ini menunjukkan bahwa PKS mampu bertahan di tengah persoalan politik yang dihadapinya dan tetap eksis di tengah ketatnya persaingan politik nasional.

Sepanjang keikutsertaannya dalam pemilu tren positif ditunjukkan oleh PKS, dimana tren perolehan suaranya cenderung stabil bahkan terus mengalami pertumbuhan. Sebagai sebuah organisasi tentu PKS tidak terlepas dari berbagai persoalan dan dinamika yang mengharuskan partai bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. PKS membuktikan kepiawaiannya dalam melakukan kontrol dan manajemen organisasi. Dengan gerak cepat PKS melakukan pergantian pimpinan partai dan melakukan konsolidasi secara internal untuk meminimalisir dampak buruk kasus yang dialami kadernya terhadap partai. Dengan usaha dan kerja keras struktur dan kader PKS, partai ini berhasil membuktikan kepada publik bahwa PKS masih mampu bertahan dan tetap eksis di

panggung politik nasional dengan capaian suara yang tidak begitu mengecewakan pada pemilu 2014.

Di tengah persoalan yang menghantam partai ini dan sentimen negatif publik PKS masih mampu mempertahankan basis dukungannya dengan perolehan suara 6.79% dan menempatkan kadernya sebanyak 40 orang sebagai wakil rakyat. Walaupun berhasil meningkatkan suara partai PKS mengalami perpecahan di internal yang menyebabkan adanya faksi-faksi yang berkeinginan untuk memisahkan diri dan melahirkan partai baru yang diinisiasi oleh gerakan GARBI. Perpecahan ini tidak luput dari adanya perbedaan pandangan yang terjadi dikubu internal PKS dalam Pemilu 2019. Begitu juga yang terjadi di kubu partai politik PPP Sebelum pemilu 2019 saja partai ini membuat perjalanan panjang terkait konflik politik partainya khususnya pada era reformasi.

PPP dipimpin oleh Suryadarma Ali periode 2007-2011; kemudian ia menjabat periode kedua pada 2011-2016; serta Romahurmuzy untuk periode 2016-2021. Namun, karena terjadi dualisme, pada periode ini juga tercatat DjanFarid sebagai ketua umum PPP. Sementara PKS, dalam periode ini dipimpin oleh Tifatul Sembiring yang menjabat periode 2004-2009; Lutfi Hasan Ishaq periode 2009-2010 dan 2010-2013 (kemudian mundur karena ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi); AnisMatta periode 2013-2015; dan Shohibul Iman periode 2015-2020. Pada tahun 2014, letusan konflik internal PPP kembali meledak. Kali ini bahkan menyebabkan terjadi dualisme kepengurusan ditingkat dewan pimpinan pusat (DPP). Konflik PPP berimplikasi pada struktur fraksi PPP di DPR. Fraksi PPP kerap merombak struktur

fraksi sehingga anggota fraksi PPP pun terbelah di DPR, hal itu membuat kinerja fraksi PPP tidak efektif.

Soliditas Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pemilu 2019 dipertaruhkan dengan kasus yang menimpa ketua umum yang tersandung kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, dengan vonis 2 tahun penjara pada sidang januari tahun 2020. Pada pemilu serentak tahun 2019 partai islam pengusung calon presiden pada PPP dan PKS berbeda dukungan dalam menentukan koalisi, PPP sudah jelas arahnya yaitu mendukung petahana, berbeda dengan PKS yang mendukung calon lain dan menjadi oposisi yang pada tahun sebelumnya juga sama menjadi koalisi penantang calon petahana.

Umumnya pada masyarakat beragama, partai politik menjadi salah satu kendaraan kelompok agama untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Alat yang sering digunakan adalah agama untuk politik atau politik untuk agama, sehingga menjadikan partai islam menggunakan simbol-simbol primordial dalam politik identitas, kemudia dijadikan senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan soliditas sebuah partai islam. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “Soliditas Partai Islam Pada Pemilu 2019 (Studi kasus antara partai PKS dan PPP)”.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan yang telah penulis tetapkan untuk diteliti

Bagaimana Soliditas Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dalam melakukan kajian penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui soliditas partai PKS dalam pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui mekanisme konsolidasi partai PKS dalam pemilu 2019.
3. Untuk mengetahui soliditas partai PPP dalam pemilu 2019.
4. Untuk mengetahui mekanisme konsolidasi partai PPP dalam pemilu 2019.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi tentang politik pemerintahan maupun studi kepartaian di Indonesia.
- b. Secara praktis, Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan perkembangan studi politik maupun studi kepartaian.